

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penelitian mengenai pekerja migran Malaysia atau kontestasi identitas etnis Malaysia atau poskolonialisme Malaysia memang telah banyak dilakukan oleh peneliti. Penelitian dalam skripsi ini bermaksud melengkapi berbagai pendekatan tersebut. Pendekatan poskolonial, banyak dikatakan sebagai pendekatan radikal karena dianggap terlalu historis dan jauh menengok kebelakang. Namun untuk mendapatkan identitas yang sangat penting dalam membangun pemahaman konstruktivis, hal itu harus tetap dilakukan.

Praktek penjajahan yang sekian lama terjadi di negara dunia ketiga termasuk Malaysia, sampai saat ini belum berakhir. Simptom-simptom kolonial yang diwariskan membentuk identitas poskolonial dalam bentuk fragmentasi identitas baik dalam ranah sosial maupun politik. Fragmentasi identitas yang berarti juga penguatan polarisasi antara *aku* dan *yang lain* ini, menyebabkan antar identitas tersebut saling berkontestasi baik secara wacana maupun praksis. Kehadiran pekerja migran sebagai identitas baru menjadikan identitas tersebut berada di paling subordinat. Pekerja migran sebagai pekerja dari luar negeri, di negara manapun memang selalu dianggap dan ditempatkan sebagai *yang lain*. Namun keberadaan identitas poskolonial Malaysia menjadikan ke '*yang lain*'an yang disandang pekerja

migran tersebut dalam titik spektrum paling jauh. Menjelma menjadi identitas subaltern yang tak terrepresentasikan.

Kesimpulan yang didapat dari penelitian skripsi ini terkait kebijakan pemerintah Malaysia terhadap pekerja migran, keberadaan poskolonial berperan sebagai *base struktur* penting yang menjelma menjadi identitas yang dimiliki oleh pemerintah Malaysia (baca: UMNO). Penjajahan Inggris selama lebih dari 100 tahun mewariskan tatanan baik itu politik maupun ide pemisahan antar kelompok etnis. Hal ini dikarenakan kebijakan politik kolonialisme yang mendatangkan kelompok etnis lain yang tanpa dibarengi dengan kebijakan asimilasi membuat hubungan antar kelompok pendatang dan masyarakat lokal beserta entitas politiknya menjadi sesuatu yang kaku. Hal ini berlanjut hingga saat pembentukan bangsa (*nation building*) ketika Malaysia merdeka, yang menjelma ide pemisahan tersebut menjadi identitas poskolonial.

Keberadaan identitas ini menjadikan identitas kelompok menjadi sesuatu yang rentan menjadi sumber konflik dan persaingan. Persaingan yang ada antara warga masyarakat yang beretnis berbeda kemudian melembaga dalam persaingan identitas politik. Melayu yang merasa menjadi penduduk asli (*indigenous people*) merasa harus dispesialkan, dengan UMNO sebagai representasi Melayu berusaha untuk merealisasikannya dengan pengekalannya dalam konstitusi. Penspesialan ini mengharuskan ada relasi dominasi-subordinasi, dimana

identitas kelompok yang lain berusaha disubordinasikan dengan

membentuk kebijakan yang membatasi mereka baik secara langsung maupun tidak langsung. ISA, *the Official Secret Act*, *Sedition Act*, *Societies Act*, *Police Act*, *public gathering*, dan *Universities Act* menjadi prasarana hegemoni UMNO dalam melanggengkan kekuasaannya.

Wujud persaingan ini, menjadikan identitas pekerja migran menjadi identitas yang paling riskan. Daya tawar ekonomi yang besar di Malaysia tidak diimbangi dengan daya tawar politik maupun sosial, yang menjadikan mereka menjadi rentan menjadi korban eksploitasi dengan ketiadaan peraturan perlindungan yang memadai. Hal ini tidak semata-mata motif legal-formal semata, melainkan karena identitas penguasa merasa terancam dengan keberadaan mereka.

Temuan yang penulis dapatkan dalam penelitian ini adalah identitas Melayu yang terancam terwakili oleh kelas aristokratnya yang menjadi aktor pengendali kekuasaan. Dari sini dapat dipahami, identitas pekerja migran tak sekedar menjadi ancaman identitas semata, tapi berkelindan dengan motif ekonomi kelas aristokrat Melayu. Perlindungan yang disertai dengan gaji yang tinggi pasti akan mengurangi kemampuan kelas aristokrat melayu yang memegang kendali ekonomi baik itu di sektor industri maupun perkebunan, selain secara makro semakin memberatkan ekonomi Malaysia.

Akhirnya, rekomendasi penulis untuk penelitian lanjutan mengenai pekerja migran Malaysia adalah perlunya pendalaman kembali pelacakan identitas postkolonial melalui pembongkaran (dekonstruksi) teks dan arsip

kolonial. Selain itu perlu juga penelitian yang lebih luas untuk mengetahui kekuatan agensi UMNO dan relasinya dengan kebijakan diambil terhadap pekerja migran dengan meneliti konstelasi dan relasi antar aktor ekonomi dan politik Melayu.

Sebagai preskripsi kebijakan, penelitian ini juga memberikan masukan mengenai perlunya perspektif identitas dalam setiap perundingan antara negara pengirim dengan negara tujuan (Malaysia). Hal ini, sesuai dengan Brettel (2000) dalam teks perspektifnya mengenai teorisasi migrasi dalam kajian antropologi, salah satu aspek dalam migrasi yaitu tentang bagaimana pekerja migran dapat menyesuaikan diri dan menyelesaikan beban persoalan (sosial maupun ekonomi) yang mereka hadapi ketika berada di negara tujuan menjadi satu penekanan yang penting. Akulturasi bahasa dan budaya, sosialisasi antar pekerja, pemenuhan hari libur, mekanisme pengawasan, dan penguatan daya tawar kapasitas pekerja migran menjadi hal penting dalam setiap kebijakan pemerintah baik terhadap pengiriman maupun dalam negosiasi dengan pemerintah

161